

ANALISIS PENGARUH PDRB, IPM, TINGKAT PENGANGGURAN DAN BELANJA PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012-2017

Oleh:

Dimas Lutfi Adhi Nugroho

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia

Email : lahum22@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran, dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tahun 2012 – 2017. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan regresi panel dengan metode estimasi *Fixed Effect* menggunakan *software Eviews 9*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel IPM dan Belanja Pemerintah memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan, Sedangkan variabel PDRB dan Tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur

Kata Kunci : *Pengaruh PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran Dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan kemiskinan*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah proses atau alat untuk mencapai tujuannya yaitu permasalahan kesejahteraan masyarakat, dimana negara tersebut semakin maju ketika ada peningkatan pada kesejahterannya. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu mengurangi pengangguran ataupun kemiskinan yang ada (Rustam 2010). Selain pertumbuhan ekonomi salah satu aspek yang digunakan untuk melihat kinerja pembangunan ekonomi adalah seberapa besar efektifitas penggunaan sumber daya yang tersedia (Yacoub 2012).

Kemiskinan di negara berkembang merupakan masalah yang cukup rumit meskipun beberapa negara telah berhasil

melaksanakan pembangunan dalam hal produksi dan pendapatan nasional (Sartika et al. 2016). Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah juga merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara/daerah tersebut (Christianto, 2013) . Indonesia adalah negara yang tergolong masih berkembang dan kemiskinan merupakan masalah yang masih menjadi perhatian.

Kemiskinan merupakan isu sentral bagi setiap negara di dunia, khususnya bagi negara berkembang, pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan akhir suatu negara. Berbagai pemikiran maupun konsep-konsep tentang kemiskinan sudah dikaji dan diadaptasi diberbagai negara namun tidak membuahkan hasil yang memuaskan, dalam konteks ini Indonesia sebagai negara berkembang yang sudah berumur 57 tahun,

masih dihindangi oleh masalah kemiskinan dimana 14% rakyat Indonesia dari kurang lebih 240 juta jiwa saat ini masih dikategorikan sebagai rakyat miskin dengan menggunakan indikator berpendapatan 1 \$ perhari, artinya masih ada sekitar 30 juta rakyat miskin di Indonesia. Yang lebih ironis apabila kita menggunakan indikator dari bank dunia dimana rakyat miskin adalah orang berpendapatan kurang dari 2\$ perhari maka angka tersebut melonjak menjadi 35% (World Bank Document, 2015).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat dalam lima tahun terakhir dibandingkan dengan negara-negara kawasan, ternyata belum mampu untuk mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang didorong oleh sektor konsumsi rumah tangga ternyata tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang dapat mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, serta belum menghilangkan tingkat disparitas antara golongan kaya dan golongan miskin.

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial, tidak hanya karena tendensinya yang semakin meningkat, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan instabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Suparlan (2000) mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah keadaan serba kekurangan harta dan benda berharga yang diderita oleh seseorang atau sekelompok

orang yang hidup dalam lingkungan serba miskin atau kekurangan modal, baik dalam pengertian uang, pengetahuan, kekuatan sosial, politik, hukum, maupun akses terhadap fasilitas pelayanan umum, kesempatan berusaha dan bekerja. Lebih jauh lagi, kemiskinan berarti suatu kondisi di mana orang atau kelompok orang tidak mempunyai kemampuan, kebebasan, aset dan aksesibilitas untuk kebutuhan mereka di waktu yang akan datang, serta sangat rentan (*vulnerable*) terhadap resiko dan tekanan yang disebabkan oleh penyakit dan peningkatan secara tiba-tiba atas harga-harga bahan makanan dan uang sekolah (UNCHS, 1996; Pandji-Indra, 2001).

Lingkaran perangkap kemiskinan (*the vicious circle of poverty*), atau dengan singkat perangkap kemiskinan, adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana sesuatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Teori ini dikerluarkan oleh Nurkse, seorang ahli ekonomi yang merintis penelaahan mengenai masalah pembentukan modal di negara berkembang.

World Bank (2002) mengategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan. Indikator pembangunan infrastruktur yang

penting adalah saluran irigasi, akses listrik, dan kondisi jalan utama transportasi. Indikator lain dari karakteristik faktor komunitas adalah akses yang sama terhadap usaha atau pekerjaan seperti keberadaan lembaga keuangan dan industry.

Menurut Jhingan (2000), kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standard hidup yang layak. Seringkali masalah kemiskinan timbul bersama dengan masalah pengangguran. Kedua masalah ini erat kaitannya dengan tinggi rendahnya kualitas Indeks Pembangunan Manusia. Dengan rendahnya kualifikasi pendidikan seseorang membuat dirinya terbatas untuk mencari lapangan kerja. Berangkat dari realita empiris tersebut, maka salah satu cara untuk menanggulangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan kualitas Indeks Pembangunan Manusia. Adapun indikator Indeks Pembangunan Manusia yaitu Tingkat Pendidikan, Kesehatan (Angka Harapan Hidup) dan Angka Melek Huruf. Penanggulangan kemiskinan menjadi penting karena jika tidak diatasi segera mungkin maka kemiskinan akan berdampak pada level yang lebih jauh seperti kualitas kehidupan manusia dan kesehatan (Groce, 2011).

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	PRESENTASE PENDUDUK MISKIN
2012	29.132.40	23.62
2013	28.066.60	22.84
2014	28.280.01	22.21
2015	28.592.79	22.35

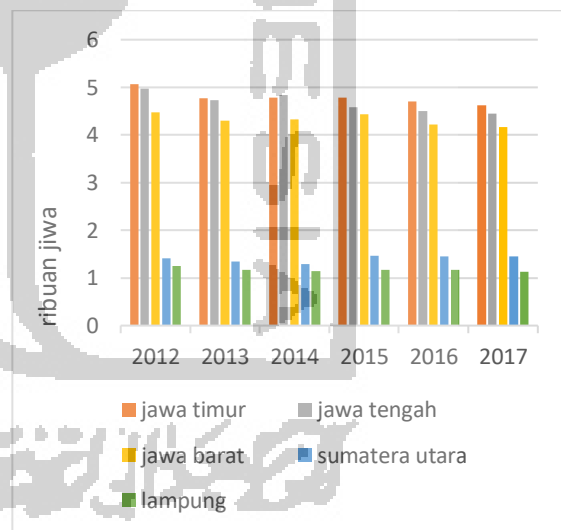
2016	28.005.39	21.56
2017	27.771.22	20.76

Sumber *Badan Pusat Statistik (BPS)*

Gambar 1

Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Indonesia

Pada Gambar 1 bisa kita lihat bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2012, akan tetapi pada tahun 2013 penduduk miskin berkurang sangat pesat dari 29.132.40 menjadi 28.066.60. Tetapi pada tahun berikutnya yaitu 2014 mengalami kenaikan kembali yang bisa kita golongan mengalami sedikit kenaikan, Lalu bisa kita simpulkan bahwasannya jumlah kemiskinan di Indonesia tergolong fluktuatif yaitu mengalami kenaikan dan penurunan di tahun-tahun berikutnya.



Gambar 2

5 Provinsi Dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbesar di Indonesia

Berdasarkan Gambar 2 tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia diduduki peringkat pertama oleh provinsi Jawa Timur, lalu disusul oleh Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatra Utara, Lampung dan

Provinsi Lainnya. Kemiskinan di Jawa Timur sendiri mengalami tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 5070.98 ribu jiwa dan pada tahun seterusnya bisa dikatakan bahwa Jawa Timur mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi ini pasti terdapat sebab-sebab yang membuat tingkat kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan. Salah satunya ialah kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan harapan dan mendapatkan hasil yang sesuai.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keberhasilan bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya yaitu pertumbuhan tersebut menyebar pada pendapatan, termasuk pada penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin di dapatkan dari sektor modern seperti jasa yang padat modal (Siregar, 2008).

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari perubahan PDRB dalam suatu wilayah. Nilai PDRB akan menunjukkan tingkat pembangunan masing-masing daerah tersebut, pada tahun 2012-2017 di Pulau Jawa Provinsi Jawa Timur memiliki nilai PDRB yang cukup tinggi. Pada tahun 2012 nilai PDRB Provinsi Jawa Timur sebesar 1.124.464.64 milyar rupiah dan

mengalami kenaikan setiap tahunnya, terakhir pada tahun 2017 nilai PDRB Provinsi Jawa Timur sebesar 1.482.147.59 milyar rupiah. Nilai PDRB Provinsi Jawa Timur menunjukkan hasil peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi nilai PDRB Jawa Timur nyatanya hal ini belum mampu untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur (%)
2012	66.74
2013	67.55
2014	68.14
2015	68.95
2016	69.74
2017	70.27

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2012-2017

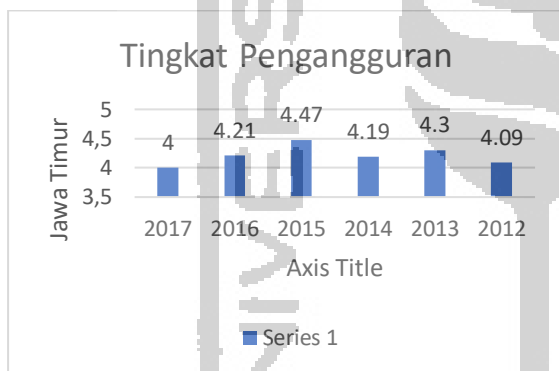
Gambar 3

Indeks Pembangunan Manusia

Pada Gambar 3 faktor lain yang memengaruhi kemiskinan ialah indeks pembangunan manusia. Pada Tabel menunjukkan bahwa Indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Timur naik secara signifikan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 indeks pembangunan manusia di provinsi Jawa Timur sebesar 66.74% dan 70.27% terjadi pada 2017 tahun kemarin. Pemerintah dalam hal ini menunjukkan sudah bekerja dengan maksimal sehingga bisa mencapai hasil seperti sekarang ini.

IPM sendiri memiliki beberapa peranan penting meliputi tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup (daya beli) atau pendapatan. Peningkatan pendidikan seseorang sering dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah

mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan, semakin tinggi produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi. Di samping pendidikan, kesehatan juga memiliki peranan terhadap pertumbuhan pendapatan. Pengaruh kesehatan terhadap pendapatan diantaranya dengan perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja. Perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan dan pengembangan potensi diri yang kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya pendapatan (Lumbantoruan dan Hidayat, 2014).



Gambar 4

Tingkat Pengangguran (%)

Gambar 4 menjelaskan bahwa pengangguran di atas menunjukkan pengangguran tertinggi di Provinsi Jawa Timur terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4.47% dan pengangguran terendah terjadi pada tahun 2017 kemarin. Pengangguran pada tahun 2015 lalu dikarenakan adanya dampak krisis global yang juga sangat berpengaruh terhadap provinsi Jawa Timur.

Keadaan perekonomian dunia dan Indonesia serta kondisi dunia usaha dan pasar kerja tersebut jelas tergambar dalam keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur

yang terefleksi dari hasil pendataan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang telah dilaksanakan pada bulan Agustus 2015 yang lalu. Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Agustus 2014 sebelumnya sempat mengalami penurunan di banding periode sebelumnya hingga hanya 20,15 juta orang, namun pada Agustus 2015 kembali menjadi 20,27 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi angkatan kerja, telah terjadi penambahan atau peningkatan sekitar 125 juta orang. Dari sisi penyerapan angkatan kerja pun, pada Agustus 2014 tercatat adanya tambahan penyerapan tenaga kerja hingga mencapai 19,37 juta orang atau tenaga kerja yang terserap di berbagai sektor/lapangan pekerjaan bertambah sebanyak 61 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2014. Tentunya hal ini memberikan gambaran yang positif tentang adanya geliat investasi di Jawa Timur dengan adanya lahan pekerjaan baru yang tersedia.

Namun demikian, tingginya penambahan angkatan kerja pada Agustus 2015 baik mereka yang benar-benar baru terjun ke pasar kerja maupun mereka yang memutuskan untuk beralih pekerjaan dan keluar dari pekerjaan lamanya ternyata tidak seiring dengan laju pertumbuhan lapangan pekerjaan yang tersedia. Kondisi inilah yang mendorong semakin bertambahnya angkatan kerja yang terkategori sebagai penganggur. Pada Agustus 2015, tercatat bahwa terjadi penambahan jumlah penganggur di Jawa Timur sebanyak 63 ribu orang dibanding periode yang sama pada tahun 2014 menjadi 906 ribu orang. Selain hal di atas, penyebab lain bertambahnya tingkat pengangguran di Jawa Timur dapat disebabkan karena masih adanya

kesenjangan antara supply tenaga kerja yang tersedia dengan demand atau kebutuhan perusahaan/usaha, minimnya informasi tentang tenaga kerja yang tersedia maupun kebutuhan dunia usaha dari sisi kualitas tenaga kerja termasuk di dalamnya tentang kondisi tenaga kerja di Jawa Timur yang dapat dikatakan relatif masih rendah yang tercermin dari kualitas pendidikan yang dimiliki oleh tenaga kerja di Jawa Timur. (sumber BPS Jawa Timur).

Pemerintah dalam hal ini berwenang untuk mengatur roda perekonomian dengan menentukan penerimaan dan pengeluaran belanja pemerintahan. Menurut Wagner dalam Yulianita (2009:7) bahwa pengeluaran pemerintah memegang peranan penting terutama dalam menyediakan barang dan jasa publik, ketersediaan barang dan jasa publik akan menentukan pengumpulan modal atau investasi masyarakat/swasta sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengumpulan modal atau investasi akan mendorong sektor produksi meningkat dan pada akhirnya akan mendorong laju pertumbuhan perekonomian. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin mencakup belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja tak terduga, serta bunga dan cicilan hutang. Pengeluaran pembangunan terdiri dari pembiayaan dan bantuan proyek.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2010-2017

Gambar 5

Belanja Total Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2017

Berdasarkan gambar 5 diatas bisa dilihat bahwa belanja pemerintah di Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya meningkat dan membuahkan hasil bahwa tingkat kemiskinan berarti menurun setiap tahunnya. Dengan adanya masalah masalah seperti diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pdrb, Ipm, Tingkat Pengangguran Dan Belanja Pemerintah Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2012-2017.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mencari tahu pokok permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atas harga konstan tahun dasar 2010 terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

4. Bagaimana pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur?

Tujuan Penelitian

Menganalisis pengaruh dari PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur 2010-2017.

Penelitian Terdahulu

Ravi dwi wijanto (2010) dari penelitiannya menghasilkan PDRB mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan mempengaruhi kemiskinan. Dwi Puspa Hambarsari dan Kunto Inggit (2016) dari penelitiannya menghasilkan pertumbuhan penduduk tidak mempunyai pengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timu. Kurnia Dwi Rahmawati (2017) dari penelitiannya menghasilkan Jumlah penduduk mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dan pengangguran mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan di DIY. Irma Setiawati (2017) dari hasil penelitiannya menghasilkan PDRB berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Nurul Fadlillah, Sukiman dan Agustin Susyatna Dewi (2016) dari hasil penelitiannya menghasilkan IPM secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Dewi Kurniawati dkk (2014) dari hasil penelitiannya menghasilkan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan.

Kemiskinan

Badan Pusat Statistik (BPS) 2018. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional sehingga menjadi prioritas pembangunan. Pemerintah Indonesia mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea ke-

empat Undang-Undang Dasar 1945. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Amartya dalam Canning, (2001) bahwa seseorang dikatakan miskin bila mengalami "*capability deprivation*" dimana seseorang tersebut mengalami kekurangan kebebasan yang substantif. Menurut Bloom dan Canning, kebebasan substantif ini memiliki dua sisi: kesempatan dan rasa aman. Kesempatan membutuhkan pendidikan dan keamanan membutuhkan kesehatan (Ravi Dwi,2010).

Menurut (*The World Bank*) Ada tiga ciri yang menonjol dari kemiskinan di Indonesia. Pertama, banyak rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan nasional, yang setara dengan PPP 1.55 dolar AS per hari, sehingga banyak penduduk yang meskipun tergolong tidak miskin tetapi rentan terhadap kemiskinan. Kedua, ukuran kemiskinan didasarkan pada pendapatan, sehingga tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Banyak orang yang mungkin tidak tergolong 'miskin dari segi pendapatan' dapat dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Ketiga, mengingat sangat luas dan beragamnya wilayah Indonesia, perbedaan antar daerah merupakan ciri mendasar dari kemiskinan di Indonesia.

Produk Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan penjumlahan dari semua harga dan jasa akhir atau semua

nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode waktu tertentu (1 tahun). Untuk menghitung nilai seluruh produksi yang dihasilkan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu.

Menurut Sadono Sukirno (2000), laju pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDRB tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi Pengaruh PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan. Selanjutnya pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya. Sehingga menurunnya PDRB suatu daerah berdampak pada kualitas konsumsi rumah tangga. Dan apabila tingkat pendapatan penduduk sangat terbatas, banyak rumah tangga miskin terpaksa merubah pola makanan pokoknya ke barang paling murah dengan jumlah barang yang berkurang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Hermanto Siregar dan Dwi Wahyuniarti, 2007.(dikutip oleh Wishnu Adhi Saputra, 2011).

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia menurut BPS merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan melalui perolehan pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hasil pembangunan lainnya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Selanjutnya dimensi tersebut diukur dengan beberapa indikator. Dimensi kesehatan diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH). Dimensi pengetahuan atau pendidikan diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Sementara itu, standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita disesuaikan.

Tingkat Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksudkan dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya.

Pengangguran akan selalu muncul dalam suatu perekonomian karena beberapa alasan. Alasan pertama adalah adanya proses pencarian kerja, yaitu dibutuhkannya waktu untuk mencocokkan para pekerja dan pekerjaan. Alasan kedua adalah adanya kekakuan upah. Kekakuan upah ini dapat disebabkan oleh tiga hal, yaitu adanya kebijakan upah minimum,

daya tawar kolektif dari serikat pekerja, dan upah efisiensi (Mankiw, 2000:123).

Belanja Pemerintah

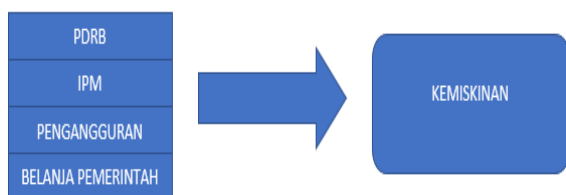
Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan dan memuat keputusan dan pilihan yang dibuat pemerintah guna menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja total pemerintah merupakan penjumlahan seluruh keputusan anggaran pada masing-masing tingkatan pemerintahan (pusat-provinsi-daerah). Pengeluaran pemerintah daerah terlihat dari belanja daerah yang terdapat pada APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Menurut Bastian (2006) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah pelimpahan rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk satuan uang untuk periode satu tahun takwim dan condong terhadap tujuan kesejahteraan publik”.

Seberapa besar belanja pemerintah untuk kesejahteraan publik dapat menunjang kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kesejahteraan yang meningkat maka pemberantasan kemiskinan disuatu daerah dapat diatasi karena tujuan utama pengeluaran pemerintah salah satunya adalah untuk memakmurkan masyarakatnya.

Gambar 6

Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran



Metode Penelitian

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sepenuhnya merupakan data sekunder. Dalam pencarian utama data tersebut berfokus pada berbagai sumber ataupun instansi yang terkait pada penelitian ini. Setelah data diperoleh kemudian disusun dan diolah sesuai dengan kepentingan penulis sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk penelitian ini data yang dibutuhkan penulis adalah data Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Timur yang meliputi data Tingkat Kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Provinsi Jawa Timur untuk Belanja Pemerintah. Untuk mendapati pengaruh dari variabel bebas yaitu PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran dan Belanja Pemerintah atas variabel dependen yaitu Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini peneliti memakai metode analisis data panel. Alat analisis yang digunakan penulis dalam penelitian adalah *Eviews 9*. Berikut model persamaan regresi dalam penelitian ini:

$$TK_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 PENG_{it} + \beta_4 PEM_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

TK= Tingkat Kemiskinan (jiwa)

t= Tahun yang diteliti (2012-2017)

i = Provinsi

β_0 = Intersept (Konstanta)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel

PDRB = PDRB (milyar rupiah)

IPM= Indeks Pembangunan Manusia (persen)

PENG= Tingkat Pengangguran (persen)
 PEM= Belanja Pemerintah (milyar rupiah)
 e = Error

	595.39982		
Cross-section F	7	(37,185)	0.0000
Cross-section Chi-square	1086.9118	43	37 0.0000

Sumber data diolah Eviews 9

Hasil dan Pembahasan

Dalam penelitian ini model regresi yang digunakan merupakan regresi data panel. Regresi data panel memiliki tiga model regresi yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Selain itu, untuk memilih regresi yang tepat digunakan penelitian ini menggunakan pengujian *Uji Chow Test* dan *Uji Hausman Test*. *Uji Chow Test* digunakan untuk memilih model regresi yang terbaik antara *Common Effect Model* atau *Fixed Effect Model*. Sedangkan *Uji Hausman Test* digunakan untuk memilih model regresi yang terbaik antara *Random Effect Model* atau *Fixed Effect Model*.

Uji Chow

Uji Chow adalah pengujian yang dilakukan untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan *common effect* atau *fixed effect*. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut :

Ho : *Common Effect Model*
 Ha : *Fixed Effect Model*

Dengan asumsi sebagai berikut:

Ho diterima jika, probabilitas $> \alpha$ (alpha) yang artinya model yang baik untuk digunakan adalah *Common Effect Model*.

Ha diterima jika, probabilitas $< \alpha$ (alpha) yang artinya model yang baik untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Gambar 7

Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
--------------	-----------	------	-------

Dari hasil pengujian diatas pada tabel 4.5 diperoleh nilai probabilitas *Cross Section F* sebesar 0,0000 dengan demikian nilai *p-value* lebih kecil dari α (0,05), sehingga dapat disimpulkan dari uji chow adalah menolak H_0 , sehingga model yang digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM).

Uji Hausman

Uji Hausman adalah pengujian untuk memilih apakah model akan dianalisis menggunakan *random effect* atau *fixed effect*. Hipotesis yang digunakan dalam hausman test adalah sebagai berikut:

Ho : *Random Effect Model*
 Ha : *Fixed Effect Model*

Dengan asumsi sebagai berikut:

Ho diterima jika, probabilitas $> \alpha$ (alpha) yang artinya model yang baik untuk digunakan adalah *Random Effect Model*.

Ha diterima jika, probabilitas $< \alpha$ (alpha) yang artinya model yang baik untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model*.

Hasil Regresi Model Terbaik

Setelah dilakukan uji model dengan menggunakan 3 metode yaitu, model *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect* telah didapatkan model yang terbaik yaitu dengan *Fixed Effect Model*. Berikut hasil dari uji regresi *Uji Chow* dengan *Uji Hausman*, model terbaik yang didapatkan adalah dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model*.

Gambar 8

Hasil Regresi Fix Effect Model

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	259.1094	9.785959	0.0000
PDRB	6.16E-05	1.123785	0.2626
IPM	-1.886507	-4.723089	0.0000
PENGG	0.062581	0.197536	0.8436
PEM	-0.003321	-2.894298	0.0043

R-squared	0.997767
Adjusted R-squared	0.997272
F-statistic	2015.875
Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber data diolah Eviews 9

Berdasarkan hasil regresi Fix Effect Model dapat dituliskan dengan model regresi dan persamaan sebagai berikut :

$$KEM_{it} = \alpha_i + \beta_1 PDRB + \beta_2 IPM + \beta_3 PENG + \beta_4 PDDK + \epsilon_{it}$$

$$KEM = 259.1094 + 6.16E - 1.886507 + 0.062581 - 0.003321$$

Dimana KEM = Kemiskinan, PDRB = Produk Domestik Regional Bruto, IPM = Indeks Pembangunan Manusia, PENG = Pengangguran dan PEM = Belanja Pemerintah.

Uji Statistik t

Uji t atau yang biasa disebut dengan koefisien regresi parsial yaitu digunakan untuk melihat pengaruh dari setiap variabel independen sebuah penelitian terhadap variabel dependen dari penelitian.

Hasil Regresi menyatakan bahwa PDRB (X1) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas $0.2626 > \alpha 5\%$.

Hasil Regresi menyatakan bahwa IPM (X2) diperoleh probabilitas IPM (X2) sebesar $0,0000 < \alpha 5\%$, maka dapat

disimpulkan bahwa variabel IPM (X2) signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Hasil Regresi menyatakan bahwa Tingkat Pengangguran (X3) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan nilai probabilitas $0.8436 > \alpha 5\%$.

Hasil Regresi menyatakan bahwa Belanja Pemerintah (X4) diperoleh probabilitas Belanja Pemerintah (X4) sebesar $0.0043 < \alpha 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Pemerintah (X4) signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Dari hasil estimasi yang telah dilakukan diatas didapatkan nilai Prob (F-statistic) $0.000000 < \alpha 5\%$ maka hasil tersebut signifikan yang berarti terdapat pengaruh antara variabel PDRB, IPM, PENG, dan PEM terhadap Tingkat kemiskinan.

Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan hasil regresi *Fixed Effect Model* diketahui R² sebesar 0.997767 menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, IPM, Tingkat Pengangguran, dan Belanja Pemerintah sebesar 99% dan 1% di jelaskan menggunakan variable lainnya di luar model.

Pembahasan

Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Berdasarkan para ahli dalam teori bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat kemiskinan dengan melalui sektor industri pertanian sebagai sektor utama

penggerak pertumbuhan ekonomi. Kemungkinan yang terjadi adalah arus keuangan dan pendapatan dalam perekonomian hanya mengalir pada golongan masyarakat berpendapatan menengah keatas atau dengan kata lain terdapat ketidakmerataan pendapatan. Penelitian yang saya lakukan memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari yang berjudul pengaruh PDRB terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2012-2015.

Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan dengan ditunjukkan koefisien sebesar -3.157656 yang berarti bahwa ketika IPM naik 1% maka tingkat kemiskinan akan menurun sebesar 3.157656 ribu jiwa. Hal ini sejalan dengan pernyataan Arsyad (2010) salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah dengan pembangunan sumber daya manusia. Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah secara keseluruhan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. IPM merupakan ukuran untuk pembangunan manusia secara relatif, apabila IPM meningkat berarti kesejahteraan masyarakat juga meningkat, dengan demikian kemiskinan menurun.

Tingkat Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini dikarenakan bahwa tidak semua orang menganggur itu selalu miskin. Karena seperti halnya penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran terbuka ada beberapa macam penganggur, yaitu mereka yang mencari kerja, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak

mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang terakhir mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Diantara empat kategori pengangguran terbuka diatas bahwa sebagian diantaranya ada yang masuk dalam sektor informal, dan ada juga yang mempunyai pekerjaan dengan jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu. Selain itu pastilah juga ada yang berusaha atau mempersiapkan usaha sendiri, ada juga yang sedang menunggu mulainya bekerja, ada juga yang mempunyai pekerjaan paruh waktu (PartTime) namun dengan penghasilan melebihi orang bekerja secara normal, dan yang mana semua golongan tersebut masuk dalam kategori pengangguran terbuka. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Rusdarti (2013) yang menyimpulkan Pengangguran tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin pada masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur

Belanja Pemerintah mempunyai pengaruh terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien sebesar -0.003321 maka dapat diartikan ketika Belanja Pemerintah naik sebesar 1 milyar maka tingkat kemiskinan akan turun sebesar 0.003321 ribu jiwa. Penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Widodo, Waridin dan Maria (2011), yang mengungkapkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan digunakan untuk pembangunan masyarakat sehingga dapat menekan angka kemiskinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab

iv, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2017, yang artinya semakin tinggi PDRB tidak mempengaruhi menurunnya tingkat kemiskinan di kabupaten Provinsi Jawa Timur.
2. Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan angka negatif dan signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa IPM berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2017. Yang dimana dimaksudkan bahwa ketika IPM naik maka kemiskinan akan menurun.
3. Pengangguran tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2017. Yang dimana dimaksudkan ketika tingkat pengangguran naik maka tidak akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan.
4. Belanja pemerintah menunjukkan angka negatif dan signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa Belanja Pemerintah berpengaruh terhadap Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012-2107. Yang artinya ketika Belanja pemerintah naik maka tingkat kemiskinan akan turun.
5. PDRB harus dialihkan pada sektor dimana kemiskinan terjadi.
6. IPM berdasarkan hasil penelitian berpengaruh terhadap kemiskinan, dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sudah melakukan upaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan diharapkan Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk bisa lebih baik dalam membuat program-program bagi masyarakat agar bisa meningkatkan IPM.
7. Pengangguran berdasarkan hasil penelitian tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, pemerintah harus fokus terhadap pengetasan kemiskinan dengan memberikan solusi berupa membuka lapangan usaha baru kepada masyarakat di Provinsi Jawa Timur.
8. Belanja pemerintah berdasarkan hasil penelitian terhadap kemiskinan, diharapkan belanja pemerintah bisa dialokasikan dengan baik, dan bisa ditargetkan secara tepat agar mensejahterakan masyarakat dan dapat mengurangi kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Azizah, A. N., (2016). *Pengembangan Lembar Kerja Siswa (LKS) Berbasis Pendekatan Konsep Untuk Kelas IX Semester II*, Tesis, Universitas Negeri Medan: Medan.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2017. *Indonesia Dalam Angka*.
- Badan Pusat Statistik. 2012-2017. *Jawa Timur Dalam Angka*.

Saran

1. Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sehingga diharapkan

Bank Dunia. (2006). Era baru dalam pengetasan kemiskinan di Indonesia. : Gradasi Aksara.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. 2012-2017. Jawa Timur.

Hambarsari, D. K. & Inggit, Kunto. (2016). "Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pertumbuhan penduduk dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur tahun 2004-2014". Fakultas Ekonomi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Irhamni (2017). "Pengaruh jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 1986-2015". Program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.

Lumbantoruan. Pratiwi, E. & Hidayat, P. (2014). "Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi-Provinsi Di Indonesia". (Metode Kointegrasi). Ekonomi Dan Keuangan. Universitas Sumatera Utara, Vol.2, No.2. Medan.

Mahsunah, Darrotul. (2013). "Analisis pengaruh jumlah penduduk, penduduk dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur". Prodi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Unesa, Kampus Ketintang Surabaya.

Mankiw, G. N. (2000). Pengantar Ekonomi ; Edisi ke-4. Erlangga: Jakarta.

Mustika, Candra. (2011). "Pengaruh PDRB dan Jumlah Penduduk terhadap

Kemiskinan di Indonesia Periode 1990-2008". Jurnal Paradigma Ekonomika Vol. 1 No. 4 Bulan Oktober 2011.

Nurhadi. (2007). Mengembangkan Jaminan Sosial dan Mengentaskan Kemiskinan. Cetakan pertama, Yogyakarta: Media Wacana.

Permana, Anggit Yoga dan Arianti, Fitri. (2012). "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009". Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Rahardjo. (2005). "Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah", Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rahmawati, D. K. (2017). "Analisis pengaruh jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di DIY tahun 2006-2013". Program studi ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Rejekiingsih, T. W. (2011). "Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kota Semarang dari Dimensi Kultural". Jurnal Ekonomi Pembangunan.

Rusdarti, L. K. (2013). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah". Jurnal Economics.

Setiawati, Irma. (2017). "Pengaruh produk domestik regional bruto, pendidikan dan tenaga kerja terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten

- Pinang”.IESP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negri Alaudin, Makasar.
- Siregar, Hermanto. & Wahyuniarti, Dwi. (2008). “Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin”.
- Sitepu, Rasidin K. dan Bonar M. Sinaga, (2004). “Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia”. Pendekatan Model Computable General Equilibrium.
- Suharto, Edi. (2009).”Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia” , Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. (2000). “Makroekonomi Modern”. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2004). “Makroekonomi Teori Pengantar”. Edisi Ketiga. Penerbit Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sunusi, D. K., Kumenaung, A. & Rotinsulu, D. (2014). “Analisis pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, pengeluaran pemerintah pada pertumbuhan ekonomi dan dampaknya terhadap kemiskinan di Sulawesi Utara tahun 2001-2010”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Suryono, W. B. (2010). ”Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Tingkat Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah”. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Susanti, Sussy. (2013). “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis Data Panel”. STIE Ekuitas.
- Tulus H. Tambunan, (2001). Perekonomian Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wijayanto, Ravi Dwi. (2010). “Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah tahun 2005-2008”. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang.
- Wongdesmiwati. (2009). Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Ekonometrika.
- Wulandari, Fransiska Hastin (2016). “Pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran dan pendidikan terhadap kemiskinan provinsi Indonesia tahun 2008-2012”. S1 thesis, UAJY.